

BULETIN EKONOMI MONETER DAN PERBANKAN

Volume 3, Nomor 2, September 2000

Kinerja dan Fungsi Intermediasi Perbankan Pasca Krisis dan Era Otonomi Daerah : <i>Overview</i> _____	iii
Struktur Pembentukan Suku Bunga dari Sisi Perbankan <i>Ridho Hakim, Bambang Kusmiarso, Gunawan, Erwin Gunawan H., Bambang Pramono, dan Masagus Abdul Aziz</i> _____	1
Baseline Survey Mengenai Kondisi Internal, Persaingan dan Sistem Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Timur <i>Djoko Sutrisno, Tjahjono, Mohamad Amin, dan Johny Marsius</i> _____	76
Peran Perbankan Sulawesi Tenggara dengan diberlakukannya Otonomi Daerah <i>Timbul Budi Santoso, Dedi Noor Cahyanto, Kamaruddin Nur, dan Leo R. Tandiarang</i>	153
Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Thailand <i>Nurmadi H. Sumarta, M.Si. Ak. Dan Dr. Yogyanto HM, MBA</i> _____	183



BANK INDONESIA

Kinerja dan Fungsi Intermediasi Perbankan Pasca Krisis dan Era Otonomi Daerah :

Overview

Juda Agung *)

Kinerja perbankan saat ini, walaupun telah mulai membaik yang tercermin dari meningkatnya penghimpunan dana, membaiknya kecukupan modal dan menurunnya non-performing loans, masih ditandai dengan masih belum pulihnya fungsi intermediasi. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik oleh perbankan itu sendiri maupun kondisi sektor riil yang oleh perbankan masih dianggap mempunyai risiko yang tinggi. Di sisi perbankan, belum pulihnya fungsi intermediasi tidak terlepas dari konsolidasi yang dilakukan oleh perbankan dalam memenuhi berbagai ketentuan prudensial Bank Indonesia dan akibat masih lambatnya restrukturisasi kredit perbankan. Di sektor riil, lambatnya proses restrukturisasi perusahaan dan konsolidasi internal perusahaan dalam rangka mengurangi tingkat leverage, menyebabkan pertumbuhan perekonomian tidak dapat berlajam lebih cepat karena perusahaan yang masih dalam proses restrukturisasi memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian. Perkembangan tersebut telah menyebabkan penyaluran kredit baru belum optimal. Akibatnya, perbankan secara umum mengalami kelebihan likuiditas dan dana yang dimobilisasi dari masyarakat lebih banyak ditempatkan dalam bentuk surat-surat berharga yang *risk-free* seperti SBI dan obligasi pemerintah.

Masih belum pulihnya intermediasi perbankan ini bukan hanya menghambat proses pemulihan ekonomi, tetapi juga menghambat efektivitas kebijakan moneter. Menurunnya efektifitas kebijakan moneter ini dikonfirmasi oleh studi yang dilakukan oleh **Hakim, et al.**¹ Berdasarkan hasil penelitian struktur pembentukan suku bunga yang dilakukan melalui survey dan analisis kuantitatif, diperoleh kesimpulan bahwa sebelum krisis sebagian besar bank menggunakan suku bunga SBI sebagai benchmark dalam menentukan suku bunga deposito 1 bulan. Sementara dalam penentuan suku bunga kreditnya, sebagian besar bank menggunakan suku bunga peer group dan market rate.

*) Peneliti Ekonomi Yuniior Bagian Studi Struktur dan Perkembangan Pasar Keuangan

1 Ridho Hakim, Bambang Kusmiarso, Gunawan, Erwin G Hutapea, Bambang Pramono dan Masagus Abdu1 Aziz (2000). *Struktur Pembentukan Suku Bunga dari Sisi Perbankan*.

Setelah krisis, kenaikan dan penurunan suku bunga SBI tidak lagi direspon dengan baik yang tercermin dari adanya rigiditas perubahan suku bunga deposito dan kredit. Lebih jauh studi tersebut menemukan adanya respon yang asimetri dari perbankan terhadap suku bunga kebijakan moneter. Respon yang diberikan bank sangat tinggi pada saat suku bunga SBI turun, sebaliknya tidak demikian pada saat suku bunga SBI naik. Hal ini terjadi sebagai akibat masih tingginya ketergantungan bank terhadap SBI dan masih enggan menyalurkan dananya dalam bentuk kredit (*credit crunch*). Studi tersebut juga mengindikasikan masih tingginya spread antara suku bunga kredit dan suku bunga deposito yang mencerminkan masih rendahnya efisiensi operasional perbankan di Indonesia.

Dalam situasi belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan, lembaga keuangan mikro seharusnya dapat mengambil peranan bank sebagai lembaga intermediasi. Bank Perkreditan Rakyat baik konvensional maupun syariah, sebagai salah satu lembaga mikro yang jangkauannya sampai ke pelosok daerah, menjadi relevan untuk dikaji lebih jauh seberapa jauh perkembangannya dan peranannya dalam perekonomian. Sayangnya, penelitian Baseline Survey yang dilakukan oleh **Kantor Bank Indonesia Surabaya**² mengenai kondisi internal, persaingan dan sistem pengawasan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Timur, memberi gambaran bahwa sebagian besar BPR yang di survey di Jawa Timur tidak memiliki kinerja yang baik. Kelebihan likuiditas adalah ciri umum yang dimiliki oleh BPR yang besar karena mampu menghimpun dana dari deposito namun sulit untuk memberikan pembiayaan. Sebaliknya, BPR kecil cenderung mengalami kesulitan untuk memobilisasi dana.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, perbankan dituntut untuk antisipatif. Pergeseran fungsi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta alokasi dana pembangunan yang selama ini didominasi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah membawa beberapa implikasi pada peran perbankan di daerah. Studi yang dilakukan oleh **Santoso, et al.**³ mengkaji pengaruh dan peluang perbankan di Sulawesi Tenggara sehubungan diberlakukannya UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Studi ini khususnya menganalisis prospek penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam era baru tersebut.

Dengan menggunakan survei dan analisis kuantitatif, studi tersebut berkesimpulan bahwa era otonomi daerah akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Laju kenaikan pendapatan ini diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan laju kenaikan konsumsi sehingga diperkirakan tabungan masyarakat akan meningkat yang merupakan peluang perbankan dalam menghimpun dana. Walaupun penghimpunan dana mengalami

2 Kantor BI Surabaya (2000). *Baseline Survey Mengenai Kondisi Internal Persaingan dan Sistem Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Timur*.

3 Timbul Budi Santoso, Dedi Noor Chayanto, Kamaruddin Nur dan Leo R. Tandiarang (2000). *Peran Perbankan Sulawesi Tenggara dengan Diberlakukannya Otonomi Daerah*.

peningkatan yang signifikan, laju pertumbuhan kredit diperkirakan tidak secepat laju pertumbuhan dana, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa perbankan di Sulawesi Tenggara lebih berperan sebagai cabang penghimpun dana dan terjadinya net negative transfer dana perbankan di daerah ini.

Terakhir, artikel yang ditulis oleh **Sumarta dan Yogyanto**⁴ membandingkan kinerja perbankan Indonesia dan Thailand yang telah terdaftar di bursa efek dengan menggunakan data sebelum krisis (1994-1996). Perbandingan ini menarik mengingat adanya kemiripan antara struktur perbankan Thailand dan Indonesia, terutama adanya hubungan antara perbankan dan grup perusahaan. Dengan menggunakan CAMEL dan beberapa indikator kinerja seperti CAR, kualitas aset dan rentabilitas, studi tersebut menyimpulkan bahwa secara umum kinerja perbankan Indonesia lebih baik dibanding kinerja perbankan Thailand. Hasil studi ini agak di luar dugaan mengingat pulihnya restrukturisasi perbankan di Thailand lebih cepat dari perbankan di Indonesia. Hal ini barangkali disebabkan karena bank-bank yang dijadikan sampel hanyalah bank-bank yang terdaftar di bursa efek.

4 Sumarta dan Yogyanto (2000). *Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Thailand*.